

Tabel 3.12
Setelah Perubahan
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Pendapatan
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD Kota Bekasi

Visi: Maju, Sejahtera dan Ihsan				
No	Misi dan Program Pemerintah Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran masing kurang optimal	Kurangnya pagu anggaran dalam memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Implementasi Reformasi Birokrasi terus berjalan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih kurang memadai sarana dan prasarana aparatur	Kurangnya pagu anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Semangat ingin mendapatkan WTP tetap terjaga
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersebar dan banyaknya aparatur di lingkungan Bapenda Kota Bekasi	Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah	Adanya Insentif di Bapenda
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya kompetensi aparatur di lingkungan Bapenda	Pelaksanaan tugas tidak sesuai kompetensinya	Tersedianya kesempatan pelatihan dan pendidikan untuk aparatur dalam meningkatkan kompetensi
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengolahan data masing kurang optimal	Pemahaman terhadap dokumen perencanaan masih kurang	Tersedianya Dokumen perencanaan
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pendapatan Daerah Belum Optimal	Penerapan sanksi hukum belum optimal.	Alokasi ketersediaan anggaran pembangunan untuk pelayanan masyarakat kota ditingkatkan
		Belum optimalnya tata kelola Pendapatan Daerah	Adanya perbedaan penafsiran terkait jenis-jenis pajak daerah untuk jenis usaha tertentu	Bertambahnya Wajib Pajak setiap tahun
		Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sosialisasi dan transparansi ke masyarakat terkait pajak daerah dan pendapatan daerah	Beralihnya beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah
		Masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak		
		Regulasi selalu berubah-ubah		
		Data potensi Pendapatan Daerah belum tergali secara maksimal		
		Peran KoorBadani masih kurang maksimal		
		Pengendalian dan Pengawasan belum optimal		

program saja yakni Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.11
Sebelum Perubahan
Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja Pendapatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program RPJMD Kota Bekasi

Visi: Maju, Sejahtera dan Ihsan				
No	Misi dan Program Pemerintah Kota Bekasi	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	Misi 1 Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik			
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pendapatan Daerah Belum Optimal	Penerapan sanksi hukum belum optimal.	Meningkatnya kebutuhan anggaran pembangunan untuk pelayanan masyarakat kota
		Belum optimalnya tata kelola Pendapatan Daerah	Adanya perbedaan penafsiran terkait jenis-jenis pajak daerah untuk jenis usaha tertentu	Bertambahnya Wajib Pajak setiap tahun
		Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sosialisasi dan transparansi ke masyarakat terkait pajak daerah dan pendapatan daerah	Beralihnya beberapa pajak pusat menjadi pajak daerah
		Masih kurangnya kesadaran WP dalam membayar pajak		
		Regulasi selalu berubah-ubah		
		Data potensi Pendapatan Daerah belum tergali secara maksimal		
		Peran KoorBadani masih kurang maksimal		
		Pengendalian dan Pengawasan belum optimal		
2	Program pengadaan, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih terbatas dalam pengelolaan pendapatan daerah	Masih kurang efektifnya pelayanan pendapatan daerah	Adanya Kebijakan tentang Pengolahan Data Berbasis Sistem dan Indormasik
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana		
3	Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan	Kompetensi SDM masih kurang	Kurangnya Pemahaman Aparatur tentang Pajak Daerah	Adanya Instenstif Pendapatan Asli Daerah
			Kurangnya kompetensi aparatur dalam menggolah data berbasis teknologi	

- Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang juga harus dilaksanakan seperti peraturan tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2014
- Menyempurnakan kinerja Bapenda yang lebih terarah dan fokus terhadap pengelolaan pendapatan yang optimal

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun Revisi Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan peningkatan kinerja serta perbaikan bagi penyusunan Renstra Bapenda Kota Bekasi pada Periode berikutnya.

Bekasi, Januari 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI



DR. H. AAN SUHANDA, SH, M.Si, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620112 198603 1 019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Tahun 2013 dapat diselesaikan. Perubahan kelembagaan tentang pengelola keuangan daerah khususnya pengelolaan pendapatan daerah di Pemerintahan Kota Bekasi yang semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Bapenda Kota Bekasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Bekasi adalah lembaga dalam kategori urusan penunjang pemerintahan umum yakni dalam hal urusan pengelola keuangan daerah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (tentang Perangkat Daerah), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Pokok dan Fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Bapenda sebagai OPD Pemerintah Kota Bekasi berwajib untuk menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan lima (5) tahunan sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap OPD wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka Bapenda Kota Bekasi terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang di dalamnya memuat tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam penyusunan Revisi Renstra Bapenda Tahun 2013 – 2018 latar belakang oleh :

- Revisi Renstra Bapenda Kota Tahun 2013 – 2018 adalah upaya mendukung pembangunan di Kota Bekasi dan sebagai bahan data perubahan Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018
- Perubahan Kelembagaan dari Dispenda menjadi Bapenda
- Hasil dari review kapabilitas yang dilakukan oleh BPKP dan Pemerintahan Australia.
- Menyikapi perkembangan yang signifikan dalam penerimaan pendapatan daerah

RENSTRA



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2013 - 2018**